



7.001 Rekening Penerima Bansos Terindikasi Judol

YOGYA, TRIBUN - Sebanyak 7.001 rekening penerima bantuan sosial (bansos), termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) di DIY diduga terindikasi judi online (judol).

Temuan tertinggi berasal dari Gunungkidul, yaitu mencapai 2.397, disusul Bantul sebanyak 1.711, kemudian Sleman sebanyak 1.106, Kota Yogyakarta sebanyak 938, dan Kulon Progo sebanyak 849.

Kepala Dinsos DIY, Endang Patmin-tarsih mengatakan, data tersebut merupakan temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan adanya temuan itu, maka ribuan penerima bansos tersebut dicoret sementara dari daftar penerima

manfaat.

"Begini, jadi sesuai dengan temuan PPATK, kalau kemarin kan bantuan PKH itu yang banyak (indikasi judol). Jadi itu yang sementara kita berhentikan. Ini kebijakan dari Kementerian Sosial, sesuai bansos yang dia terima," katanya, Minggu (16/11).

Kendati demikian, pihaknya masih membuka ruang klarifikasi dari para penerima manfaat yang dicoret sementara.

Pihaknya meminta Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk klarifikasi.

"Nah, PPATK kan berdasarkan nomor rekeningnya, sehingga perlu dicek,

● ke halaman 11

GRAFIS/SULUH PRASETYA

SEMENTARA DICORET

- 7.001 Rekening penerima bansos terindikasi judi online sehingga untuk sementara dicoret
- Gunungkidul mencapai 2.397 rekening
- Bantul sebanyak 1.711 rekening
- Sleman sebanyak 1.106 rekening
- Kota Yogyakarta ada 938 rekening



7.001 Rekening

● Sambungan Hal 1

benar atau tidak. Kan perlu dicek, sehingga kami Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti itu," sambungnya.

Jika nantinya terbukti digunakan untuk judol, maka pihaknya akan mengeluarkan penerima manfaat tersebut dari data bansos.

Menurut dia, bansos merupakan program pemerintah sementara untuk peme-

nuhan dasar. Melalui program bansos, pemerintah juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tersebut dapat diwujudkan dengan peningkatan keterampilan dan lain-lain.

"Bansos itu kan cuma sementara, kalau memang tidak membutuhkan, ya kita cabut. Kalau diberikan bansos, tetapi untuk seperti itu (judol) kan tidak ada manfaatnya, berarti tidak membutuhkan," terangnya.

"PKH itu kan yang menerima istrinya, mungkin is-

trinya tidak menggunakan untuk judol, tetapi yang menggunakan suaminya, atau anaknya. Kan sama saja. Bantuan itu kan untuk keluarga," lanjutnya.

Dengan adanya indikasi penyalahgunaan bansos, pihaknya mengoptimalkan program rehabilitasi sosial. Melalui rehabilitasi sosial, pihaknya ingin mengubah pola pikir masyarakat agar tidak tergantung pada bansos.

Bantuan sosial dan beragam program pemberdayaan diberikan untuk mendorong

masyarakat mandiri.

"Bansos itu kan sementara, dalam masa krisis sosial. Lalu kita ada pemberdayaan sosial, bagaimana kita mendampingi mereka, menggali skillnya, dia bisa usaha apa, bisa kerja apa, kita kasih bimtek, kalau belum ada modal kita berikan bantuan modal. Ini kita lakukan agar masyarakat mandiri. Jangan sampai masyarakat jadi mengharap bansos. Nah ini yang harus kita ubah (dengan rehabilitasi sosial)," tandasnya. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005